

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti (Sugiyono, 2018). Adapun tahapan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Identifikasi Masalah Penelitian

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Peneliti mulai dengan mengeksplorasi isu-isu utama terkait tindak pidana pencucian uang, serta kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil eksplorasi awal ini, dirumuskan pertanyaan penelitian utama, yaitu "Sejauh mana kebijakan hukum pidana di Indonesia efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang?" Pada tahap ini, peneliti juga menetapkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya.

Identifikasi Masalah Penelitian Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Peneliti mulai dengan mengeksplorasi isu-isu utama terkait tindak pidana pencucian uang, serta kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil eksplorasi awal ini, dirumuskan pertanyaan penelitian utama, yaitu "Sejauh

mana kebijakan hukum pidana di Indonesia efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang?" Pada tahap ini, peneliti juga menetapkan tujuan penelitiIdentifikasi Masalah PenelitianTahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Peneliti mulai dengan mengeksplorasi isu-isu utama terkait tindak pidana pencucian uang, serta kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil eksplorasi awal ini, dirumuskan pertanyaan penelitian utama, yaitu "Sejauh mana kebijakan hukum pidana di Indonesia efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang?" Pada tahap ini, peneliti juga menetapkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya.an, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya.

Pengumpulan Literatur dan Sumber Data

Setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan literatur dan sumber data yang relevan. Peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, serta sumber-sumber lain seperti laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi dari lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF). Literatur yang dikumpulkan meliputi buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen hukum terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, peran PPATK, serta studi kasus terkait pencucian uang di Indonesiadengan menggunakan kata kunci seperti Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Evaluasi Kualitas dan Relevansi Literatur

Setelah literatur dikumpulkan, peneliti melakukan evaluasi terhadap kualitas dan relevansi sumber-sumber tersebut. Tahap ini melibatkan penilaian terhadap validitas, kredibilitas, dan kesesuaian literatur dengan topik penelitian. Peneliti memastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih berasal dari penulis yang memiliki otoritas di bidangnya, serta diterbitkan oleh penerbit yang diakuidengan adanya ISSN dari LIPI dan BRIN serta sudah terakreditasi

SINTA ataupun SCOPUS. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan relevansi literatur dengan konteks hukum dan praktik di Indonesia, sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai situasi yang ada.

Interpretasi dan Penyusunan Hasil Penelitian

Tahap selanjutnya adalah interpretasi hasil analisis dan sintesis literatur. Peneliti menginterpretasikan temuan-temuan yang diperoleh dengan menghubungkannya dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, peneliti juga membahas implikasi temuan-temuan tersebut terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis, yang mencakup pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

Validasi dan Penyempurnaan Hasil Penelitian

Tahap akhir dari penelitian ini adalah validasi dan penyempurnaan hasil penelitian. Peneliti melakukan peer review atau meminta masukan dari pakar di bidang hukum pidana dan pencucian uang untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah sesuai dengan standar akademik dan relevan dengan konteks yang diteliti. Berdasarkan masukan yang diterima, peneliti melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap laporan penelitian, sehingga hasil akhir yang

dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia. Literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Validasi dan Penyempurnaan Hasil Penelitian Tahap akhir dari penelitian ini adalah validasi dan penyempurnaan hasil penelitian. Peneliti melakukan peer review atau meminta masukan dari pakar di bidang hukum pidana dan pencucian uang untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah sesuai dengan standar akademik dan relevan dengan konteks yang diteliti. Berdasarkan masukan yang diterima, peneliti melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap laporan penelitian, sehingga hasil akhir yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia.